

**TINDAKAN KDZ YANG MENGATUR PEMENANG LELANG  
PENGADAAN BARANG/JASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama : Yehezkiel Rico Giovanny Donda  
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
Pembimbing :

1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi secara khusus dalam pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan karena kurangnya pengawasan atau manajemen yang baik dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga menimbulkan kerugian terhadap perekonomian negara. Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum seperti pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangannya memiliki tujuan untuk dapat memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau pihak lain. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan KDZ yang mengatur pemenang lelang pengadaan barang di Kabupaten Nias dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto KUHP. Tindakan KDZ selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan bibit karet okulasi PB 260 yang secara bersama-sama mengatur pemenang lelang serta menerima suap untuk menyalahgunakan kewenangannya yang menimbulkan kerugian negara telah terbukti, sehingga atas perbuatannya KDZ dapat dikenakan Pasal 3 dan 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa, Pegawai Negeri.

**THE ACT OF KDZ GOVERNING THE WINNER OF GOODS/SERVICES  
PROCUREMENT AUCTION REVIEWED FROM THE LAW NUMBER 20  
OF 2001 REGARDING THE AMENDMENT TO LAW NUMBER 31 YEAR  
1999 REGARDING THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF  
CORRUPTION**

*Name : Yehezkiel Rico Giovanny Donda  
Discipline/Study Program : Law/ Legal Studies  
Contributor :*

1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

**ABSTRACT**

*Criminal acts of corruption is specifically in the procurement of goods/services is one form of crime conducted due to lack of supervision or good and effective management in the administration of the government, causing losses to the country's economy. Criminal acts of corruption conducted by law enforcers such as civil servants by abusing their authority has the purpose of being able to obtain benefits for themselves or other parties. This thesis aims to analyze whether KDZ actions governing the winners of procurement of goods in Nias Districts can be subject to criminal liability reviewed by Law Number 20 Year 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption Juncto Criminal Code. The action of KDZ as the Commitment Making Officer (PPK) in the procurement of PB 260 grafting rubber seedlings which jointly regulates auction winners and accepts bribes to abuse their authority which has caused state losses has been proven, so that the KDZ can be subject to Article 3 and 12 b of the Law Number 20 Year 2001 concerning Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption Juncto Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code.*

*Keyword : Criminal Acts of Corruption, Procurement of Goods/Services, Civil Servants.*